

## ANALISIS PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK PADA MANUSIA BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN

Faturohman<sup>1</sup>, Heri Maryanto<sup>2</sup>, Ariadina<sup>3</sup>

[arturcikaseban@gmail.com](mailto:arturcikaseban@gmail.com)<sup>1</sup>, [hery.djogdja@gmail.com](mailto:hery.djogdja@gmail.com)<sup>2</sup>, [dinaaria14@gmail.com](mailto:dinaaria14@gmail.com)<sup>3</sup>

Universitas Bina Bangsa

### Abstrak

Pelanggaran suatu hak pada manusia ini merupakan suatu isu yang sangat memerlukan perhatian yang sangat serius dari berbagai pihak, Hak pada manusia ialah suatu dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, pelanggaran hak ini mencakup berbagai suatu tindakan baik berupa diskriminasi atau kejahatan lainnya. Adanya peraturan mengenai penyelesaian dalam hak pada manusia ini, ada beberapa jenis pelanggaran pada hak ini ialah adanya pelanggaran pada sipil ataupun politik, ialah adanya penahanan yang dilakukan secara sewenang-wenangnya. Bukan hanya itu saja, adanya pelanggaran lainnya ialah sosial yang dimana adanya kejahatan akan suatu pendidikan yang di dapat lakukan di masyarakat. Upaya penyelesaian ini, dilakukan oleh pemerintah dan juga lembaga-lembaga yang terkait, banyak kasus pelanggaran terhadap hak ini, ialah tidak dapat ditangani secara tuntas. Alasannya, karena tidak adanya hambatan pada birokrasi atau kurangnya sumber daya pada manusia. Masih banyaknya masyarakat yang kurang dalam mengenal hak ini, dan upaya pemerintah ialah melakukan kegiatan kampanye tentang hak pada manusia, sehingga masyarakat ini bisa memahami hak yang dimilikinya.

**Kata kunci** : pelanggaran, penyelesaian, hak.

### Abstract

*Violation of human rights is an issue that requires very serious attention from various parties. Human rights are a basis that every human being has. Violations of these rights include various actions, whether in the form of discrimination or other crimes. There are regulations regarding the resolution of human rights, there are several types of violations of these rights, namely civil or political violations, namely arbitrary detention. Not only that, there are other violations, namely social ones, where crimes against education can be committed in society. Efforts to resolve this, carried out by the government and related institutions, many cases of violations of this right cannot be handled in a timely manner. The reason is because there are no bureaucratic obstacles or a lack of human resources. There are still many people who are not familiar with this right, and the government's efforts are to carry out campaign activities about human rights, so that these people can understand the rights they have.*

**Keywords**: violation, settlement, rights.

### PENDAHULUAN

Hak merupakan hak yang telah dimiliki oleh manusia, tanpa adanya kata mustahil bahwa manusia dapat hidup sebagai manusia. Hak yang dimiliki oleh manusia, ini memerlukan berbagai aspek kehidupan, seperti hak untuk hidup yang bebas, dan juga lainnya. Adanya perlindungan terhadap hak pada manusia ini menjadi perhatian di berbagai negara, khususnya di negara Indonesia. Penyelesaian pelanggaran hak pada manusia ini sudah di atur di dalam perundang-undangan yang dapat melibatkan langkah-langkah.

Penyelesaian pada pelanggaran yang dimiliki oleh hak pada manusia, jika berdasarkan pada perundang-undangan ini melibatkan berbagai lembaga dan juga mekanisme, baik di tingkat nasional maupun internasional. Adanya proses ini, ialah bertujuan untuk memberikan keadilan yang sangat adil bagi korban, dan juga dapat menghukum pelaku pada kejahatan ini. Penyelesaian pada suatu pelanggaran hak terhadap manusia jika didasarkan pada perundang-undnagan ini memiliki dampak yang sangat

signifikan, ialah

1. Penyelesaian akan pelanggaran terhadap hak pada manusia melalui perundang-undangan ini lebih berfokus pada pemulihan keadilan bagi korban
2. Masyarakat merasa lebih terlindungi dan juga aman dari berbagai ancaman pelanggaran hak pada manusia di masa yang akan datang
3. Publik cenderung ini, memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap lembaga penegak hukum dan pemerintah ketika mereka melihat bahwa pelanggaran pada hak yang dimiliki oleh manusia ini dapat dilakukan dengan seadil mungkin.
4. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak yang dimiliki oleh hak pada manusia ini, memiliki fungsi sebagai :
  - a. Untuk menyampaikan pesan bahwa pelanggaran hak pada manusia ini, tidak akan adanya suatu toleransi dan juga tidak dapat dikenakan sanksi yang tegas
  - b. Mendorong reformasi dalam lembaga-lembaga negara, termasuk polisi, dan juga lembaga yang terkait.
  - c. Proses hukum yang sangat transparan dan juga adanya edukasi yang menyertainya dapat:
  - d. Untuk dapat meningkatkan suatu pengetahuan masyarakat tentang hak-hak mereka dan pentingnya pada hak.
  - e. Memasukkan suatu nilai-nilai hak pada manusia ini merupakan suatu kurikulum pendidikan dan juga program pelatihan untuk berbagai profesi
5. Dianggap sebagai negara yang menghormati hukum dan hak pada manusia, ini dapat meningkatkan hubungan diplomatic dan juga adanya kerjasama yang dilakukan oleh internasional.
6. Memenuhi suatu kewajiban sesuai dengan perjanjian dan juga adanya konvensi internasional tentang hak yang dimiliki oleh manusia telah diratifikasi.
7. Guna mengurangi potensi konflik atau kekerasan yang timbul akibat ketidakpuasan terhadap suatu keadilan.

Penyelesaian pelanggaran pada hak yang dimiliki oleh manusia, di Negara Indonesia ini dapat dilakukan dengan melalui berbagai cara. dan juga ada beberapa contoh penyelesaian suatu pelanggaran terhadap suatu hak yang ada pada manusia menurut perundang-undangan, ialah :

1. Komisi terhadap hak yang dimiliki oleh manusia, ini ialah adanya lembaga yang memiliki tugas guna memantau dan juga menyelidiki terhadap pelanggaran yang dimiliki oleh hak pada manusia. Banyaknya masyarakat yang merasa bahwa haknya ini, telah di langar dan dapat mengajukan pengaduannya ke komisi yang berkaitan.
2. Adanya suatu pengaduan dapat dilakukan secara tertulis atau lisan, dan juga komisi yang terkait pada hak ini, dapat merekomendasikan suatu tindakannya kepada pihak yang berwenang.
3. Adanya ombudsman, ialah suatu lembaga yang berwenang mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah yang terkait dengan pelanggaran hak pada manusia.
4. Pelanggaran hak pada manusia seperti kejahatan akan genosida, ini merupakan suatu kejahatan perang yang dapat dibawa ke dalam pengadilan hak pada manusia.
5. Pelanggaran pada hak manusia ini, tidak termasuk ke dalam kategori pelanggaran hak yang dimiliki, dan termasuk pada hak yang sangat berat, ini dapat diajukan melalui pengadilan umum
6. Adanya komisi perlindungan anak Indonesia, ini ialah bertujuan guna melindungi pelanggaran hak pada manusia yang terkait dengan haka nak, dan masyarakat dapat melaporkannya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menjelaskan dan juga menggambarkan suatu fenomena yang dilakukan secara nyata, dan juga telah di atur di dalam perundang-undangan yang telah di tetapkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Mekanisme penegakkan hukum terhadap pelanggaran hak

Mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran hak pada manusia di Indonesia ini, dapat melibatkan beberapa langkah dan institusi yang bekerja sama untuk memastikan bahwa hak tersebut dapat dilindungi dan juga guna melanggar aka hukum.

1. Peran masyarakat sangat penting bagi mekanisme penegakkan hukum, karena masyarakat ini merasa haknya dilanggar dapat dilaporkan kasus ini, kepada aparat yang berwajib
2. Adanya komisi pada hak ini, ialah guna menerima adanya pengaduan dan juga laporan tentang pelanggaran pada hak yang dimilikinya, ini memiliki tujuan sebagai lembaga independent yang dapat mengawasi dan juga menyelidiki pelanggaran terhadap hak
3. Setelah menerima laporan, kepolisian akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait pelanggaran tersebut.
4. Pengadilan umum, yang dimana asus pelanggaran hak pada manusia ini, dapat disidangkan di pengadilan umum, yang telah tergantung pada jenis dan juga beratnya suatu pelanggaran
5. Pengadilan akan mendengarkan bukti dan argumen dari kedua belah pihak (penuntut dan pembela) sebelum membuat suatu keputusan. Jika terbukti bersalah, pelanggar hak manusia ini, akan dijatuhkan hukuman yang berlaku.
6. Lembaga permasyarakatan, ialah adanya suatu pelaksanaan hukuman, seperti adanya penahanan atau pidana lainnya, ini dapat dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan sesuai dengan putusan pengadilan.
7. Adapun kendala dalam pelanggaran hak pada manusia ini, ialah :
  - a. Korupsi, merupakan suatu perbuatan yang dapat mengesampingkan kebutuhan umum terhadap kebutuhan individu. .
  - b. Kurangnya sumber daya, ialah adanya keterbatasan akan sumber daya pada manusia dan juga finansial di institusi penegakkan yang sering sekali menjadi suatu kendala.
  - c. Adanya intervensi politik, ialah adanya pengaruh politik yang dapat mempengaruhi suatu independensi dan juga objektivitas pada proses penegakkan hukum.

Mekanisme pada penegakkan ini, pastinya memiliki tujuan yang sangat penting, ialah sebagai berikut ::

1. Mekanisme ini memiliki tujuan untuk melindungi hak pada manusia, ini dapat menjamin bahwa setiap individu ini dapat memiliki hak guna melindungi haknya.
2. Guna memastikan bahwa setiap pelanggaran hak pada manusia ini dapat diproses dengan melalui sistem peradilan yang seadil mungkin, serta adanya pelaku akan pelanggaran ini dapat diberikan sanksi.
3. Menyediakan kerangka hukum yang jelas dan tegas untuk menangani pelanggaran hak, sehingga masyarakat ini memiliki kepastian tentang konsekuensi hukum dari tindakan pelanggaran.
4. Mengimplementasikan kebijakan dan tindakan yang dapat mencegah terjadinya kembali suatu pelanggaran hak pada manusia dengan melalui edukasi
5. Melakukan suatu komitmen yang dilakukan di internasional Indonesia dalam rangka perlindungan hak pada manusia sesuai dengan perjanjian yang telah diratifikasi
6. Dapat meningkatkan kapasitas dan efektivitas institusi penegak hukum seperti

kepolisian dan juga lembaga yang terkait guna menyelesaikan kasus pada pelanggaran pada hak yang dimiliki oleh manusia secara profesional dan efisien.

7. Memastikan bahwa para korban pelanggaran hak ini, dapat memiliki kompensasi yang layak
8. Mempromosikan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak pada manusia, dan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak tersebut melalui pendidikan dan kampanye publik.
9. Membangun lingkungan sosial, politik, dan budaya yang mendukung penghormatan dan perlindungan hak pada manusia
10. Melakukan pembaruan hukum dan kebijakan untuk menutup celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pelanggaran hak

#### **Upaya pencegahan dalam pelanggaran hak**

Upaya pencegahan pelanggaran hak pada manusia ini dapat ditingkatkan melalui perundang-undangan dengan berbagai langkah, seperti :

1. Melakukan revisi terhadap perundang-undangan yang lebih komprehensif dan spesifik dalam melindungi hak pada manusia, adanya perundang-undangan ini ialah guna penambahan ketentuan yang lebih jelas dan juga adanya sanksi yang lebih berat bagi para pelanggar
2. Mengharmonisasikan berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah untuk menghilangkan ketidakkonsistenan yang dapat menghambat perlindungan pada hak. Hal ini termasuk memastikan bahwa peraturan daerah tidak bertentangan dengan prinsip yang berlaku
3. Membuat peraturan pelaksana yang jelas dan terperinci untuk mendukung implementasi
4. Melakukan pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum, tentang hak pada manusia dan bagaimana penegakkan ini dapat melindungi hak pada manusia.
5. Memperkuat suatu lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas suatu perlindungan hak pada manusia seperti adanya komisi pada hak yang dimiliki oleh manusia, dengan memberikan wewenang lebih besar, dan juga adanya sumber daya yang sangat memadai
6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum, termasuk melalui mekanisme pengawasan yang efektif dan akses publik terhadap informasi mengenai kasus-kasus pada pelanggaran hak
7. Mengatur program-program edukasi dan sosialisasi tentang hak yang dimiliki oleh manusia, yang dapat diwajibkan oleh perundang-undangan.

Upaya pemerintah dalam pencegahan pelanggaran hak pada manusia ini dapat ditingkatkan melalui suatu perundang-undangan dengan beberapa langkah strategis, ialah :

1. Memperkuat ketentuan hukum yang mengatur sanksi dan hukuman bagi pelaku pelanggaran hak pada manusia, ini mencakup peningkatan penalti bagi pelanggaran yang berat dan memastikan bahwa sanksi tersebut efektif dan memberikan efek jera.
2. Merevisi atau menyusun ulang suatu peraturan-peraturan yang ada untuk memperkuat perlindungan hak
3. Mengembangkan kebijakan preventif yang proaktif untuk mencegah suatu kasus pelanggaran yang terjadi pada hak, contohnya ialah dengan mengintegrasikan suatu pendidikan pada hak
4. Mendorong kerjasama yang lebih baik antara pemerintah, dan lembaga yang terkait guna menyelesaikan kasus ini, yang dapat membuat suatu kebijakan untuk memfasilitasi partisipasi aktif dari pihak-pihak ini dalam suatu proses pencegahan dan penanganan pelanggaran terhadap hak pada manusia.

5. Menegakkan hukum secara konsisten terhadap setiap pelanggaran hak pada manusia, tanpa adanya pandang bulu, termasuk terhadap pejabat publik atau pihak yang memiliki kekuatan atau pengaruh yang besar.
6. Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas perundang-undangan yang ada didalam, guna mencegah dan menangani pelanggaran hak pada manusia.
7. Membangun dan memperkuat sistem pengaduan publik yang efektif dan transparan untuk memfasilitasi laporan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran hak pada manusia.

## **KESIMPULAN**

Hak pada manusia ini merupakan hak dasar yang telah dibawa oleh manusia sejak lama, dan pastinya merupakan suatu anugerah bagi Allah. . Perundang-undangan di Indonesia telah mengakomodasi perlindungan pada hak yang dimiliki oleh manusia, ini sudah di atur ke dalam suatu perundang-undangan dan juga dapat menegaskan akan komitmen untuk menghormati hak nya. Meskipun kerangka hukum telah ada, implementasi yang konsisten dan efektif masih menjadi tantangan utama, adanya kasus-kasus ini ialah pelaksanaan hukum belum dapat sepenuhnya memenuhi harapan.

Melakukan kolaborasi antara pemerintah, dan lembaga yang terkait, yang bertujuan untuk dalam memantau, dan juga mengawasi hak pada manusia. Pentingnya untuk memastikan bahwa setiap individu, terutama korban pelanggaran hak pada manusia, ini memiliki suatu akses yang adil dan setara terhadap sistem peradilan. Ini mencakup pemastian bahwa proses hukum bersifat transparan, cepat, dan tidak memihak. Perlunya melakukan pembaruan perundang-undangan secara berkala untuk mengatasi perkembangan baru dan tantangan dalam perlindungan hak.

Di Indonesia, mekanisme penegakkan hukum terhadap pelanggaran hak pada manusia, ini dapat melibatkan beberapa institusi dan proses, ialah :

1. Masyarakat dapat melaporkan kasus pelanggaran hak pada manusia kepada lembaga penegakkan hukum dengan melalui pengaduan resmi atau jalur lainnya.
2. Adanya komisi pada hak manusia ini dapat memiliki mandat untuk memonitor, dan juga dapat melaporkan yang terkait pelanggaran hak pada manusia kepada pemerintah.
3. Pengadilan di Indonesia ini, memiliki wewenang untuk memutuskan kasus-kasus pada pelanggara hak

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alatas Syed Hussein, 2001, Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer, LP3ES, Jakarta.
- Firdaus Arifin, Hak pada manusia : Teori Perkembangan. Yogyakarta : Thafa Media, 2019. hal 1-2
- Mustafa Kamal Pasha, 2002, Pendidikan Kewarganegaraan (civil education), Edisi Pertama, Jogjakarta, Penerbit Citra Karsa Mandiri.